

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Selain itu, tanah juga banyak mengandung berbagai macam kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh semua makhluk hidup, terutama manusia. Dengan tanahlah manusia dapat menggantungkan hidupnya, seperti mencari nafkah dengan bertani, berkebun, berternak dan lain sebagainya.

Pemilikan tanah bagi petani sudah merupakan penentu status dan lapisan sosial. Sebagai barang yang pada prinsipnya tidak bisa diperbanyak, tanah bagi petani merupakan faktor produksi dan tempat tinggal dan semakin mempunyai *eksistensiil* jika tanah semakin sedikit. Pemilikan tanah dengan alasan ini mempunyai tingkat keterikatan emosional yang tinggi meskipun ia sendiri tidak identik dengan hak milik dalam pengertian legal. Di negara yang padat penduduknya, bagi petani kecil yang tidak mempunyai pilihan kerja lain, tanah merupakan faktor produksi penting disamping sebagai lapangan kerja. Karena itu keinginan pokok mereka adalah “mempertahankan tanah”.¹

Sistem pertanian pada masyarakat desa yang dominan, pertanian sangatlah vital artinya bagi kehidupan mereka. Sistem pertanian bagi mereka adalah merupakan cara bagaimana mereka bisa hidup. Terlebih untuk masyarakat desa yang masih bersahaja, dan kehidupannya tergantung sepenuhnya pada pertanian.

¹ Ulrich Planch, 1993. Sosiologi Pertanian. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hml 41

Maka bagi masyarakat desa semacam itu, sistem pertanian adalah identik dengan sistem perekonomian mereka, yakni bila ekonomi diartikan sebagai cara “pemenuhan keperluan jasmani manusia”. Se jauh ini digeneralisasi secara umum, desa-desa di Indonesia umumnya adalah pertanian.²

Dengan demikian, terkait bercocok tanam maka sektor pertanianlah yang paling utama berperan. Namun, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan dinamika pembangunan telah menggeser pemanfaatan lahan yang akhirnya menimbulkan kompleksitas permasalahan lahan yang semula berfungsi sebagai media bercocok tanam (pertanian), berangsur-angsur berubah menjadi multifungsi pemanfaatan. Fenomena yang selama ini terjadi menunjukkan bahwa pada dasarnya proses pembangunan di pedesaan ditandai dengan berbagai perkembangan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat misalnya berubahnya sektor pertanian ke sektor non pertanian.³ Berubahnya pemanfaatan lahan pertanian ke non pertanian dapat disebut alih fungsi lahan.

Alih fungsi lahan pertanian telah menjadi isu global tidak hanya di negara berkembang yang masih bertumpu pada sektor pertanian, namun juga di negara maju untuk menghindari ketergantungan terhadap impor produk pertanian. Hal serupa juga terjadi di negeri kita, yang salah satunya yakni di UPT Pagea SP-2 Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Adapun Gambaran singkat UPT Pangea SP-2 yang merupakan kawasan transmigrasi, dengan luas wilayah 2954 Ha, dengan jumlah penduduk secara

² Rahardjo. 2010. Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 146

³ Deliana Yusuf. 2013. Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kanal (Studi Kasus di Kelurahan Oluhuta Kecamatan Kabila). Skripsi. Gorontalo: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Hal. 3

keseluruhan sekitar 420 KK yang tersebar di 5 Dusun yaitu: Dusun Ampera, Dusun Batuwapi, Dusun Apitalau, Dusun Kenanga, dan Dusun Suka Tani. Sedangkan lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat seluas 825Ha, dan yang ditanami oleh kelapa sawit \pm 100 Ha. Selain itu, lahan yang dialih fungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit tersebut di motori oleh PT. Agro Artha Surya, maka hasil kerja PT. ini di mulai dari melakukan pembibitan, cara penanaman dan lahan yang di perlukan untuk perkebunan kelapa sawit, sampai pada tahap pembagian hasil.

Berdasarkan penelitian awal, bahwa dengan adanya PT. Agro Artha Surya telah mengubah fungsi lahan warga yang sebelumnya merupakan lahan pertanian, kini menjadi lahan non pertanian atau lebih tepatnya adalah perkebunan kelapa sawit. Meskipun lahan yang beralih fungsi ini tidak semua lahan yang dimiliki oleh warga. Akan tetapi, hanya sebagian lahan dan kebanyakan adalah lahan-lahan pegunungan yang sulit dijangkau oleh pemilik lahan karena selain jauh dari tempat tinggal warga, juga kondisi jalan yang tidak memungkinkan dilalui kendaraan. Oleh karena itu pihak perusahaan kelapa sawit menyewa lahan tersebut untuk penanaman kelapa sawit, dimana sistem pembagian hasilnya yaitu untuk lahan plasma dengan inti perbandingannya 50-50, kemudian untuk lahan bagian petani plasma sebanyak 50 persen tidak ada ganti rugi apapun atas lahan tersebut, kemudian untuk lahan bagian perusahaan (inti) 50 persen akan di beli perusahaan dengan ketentuan, lahan garapan semak belukar harga perhektar sebesar 1.5 juta, untuk lahan garapan yang sudah bersih baik itu lahan perbukitan perhektar harganya 2 juta, kemudian untuk lahan landai di bawah kemiringan 10

derajat harga perhektarnya mencapai 3 juta, dan lahan landai rata yang terletak di pinggir jalan harganya perhektar 4 juta. Dengan adanya penjelasan tersebut, maka penulis menarik kesimpulan bahwa lahan bagian petani plasma sebanyak 50 persen tidak ada ganti rugi apapun atas lahan tersebut dengan alasan bahwa dari pihak perusahaan akan memberikan kompensasi. Kemudian ketika waktu pemanenan hasil kelapa sawit berakhir maka sebagian tanah yang dialih fungsikan tersebut akan dikembalikan kepada pemilik lahan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa tingkat perekonomian di UPT Pangea SP-2 Kecamatan Wonosari setelah adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan kelapa sawit terjadi pro dan kontra, akan tetapi sebagian besar masyarakat mendukung adanya perkebunan kelapa sawit tersebut dengan alasan bahwa ketika adanya PT. Agro Artha Surya menjadikan alat transportasi akan lebih mudah masuk ke area pertanian warga untuk mengangkut hasil panen mereka, dan kehidupan masyarakatnya baik-baik saja. Kemudian sebagian masyarakat yang tidak mendukung karena ditakutkan akan membawa dampak yang tidak baik bagi lingkungan atau masyarakat setempat misalnya adanya erosi. Jika melihat tingkat perubahan dalam masyarakat sebelum dan sesudahnya bahwa jika sebelum adanya PT. Agro Artha Surya misalnya dalam memanen hasil pertanian masyarakat memiliki kesulitan dengan alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut hasil panen karena kondisi jalannya yang kurang memadai, adapun perubahan masyarakat sesudah adanya alih fungsi lahan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit yaitu dimana masyarakat tidak mendapat kesulitan dalam memanen hasil pertanian karena kondisi jalan

yang sebelumnya sulit dilalui, namun kini jalan tersebut telah dibuka dan bisa dilalui kendaraan.

Berangkat dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan penelitian dengan judul “**Alih Fungsi Lahan Pertanian**” (Studi Kasus di UPT Pangea SP-2 Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ilmiah ini adalah: “*Bagaimana alih fungsi lahan pertanian dalam kehidupan masyarakat UPT Pangea SP-2 Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo?*”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alih fungsi lahan pertanian dalam kehidupan masyarakat UPT Pangea SP-2 Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

1.4. Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui alih fungsi lahan pertanian di UPT Pangea SP-2 Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.
2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan sebagai hasil dari pengamatan yang dilakukan secara langsung mengenai alih fungsi lahan pertanian di UPT Pangea SP-2 Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

B. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi pembaca tentang alih fungsi lahan pertanian.